Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora
pISSN : 2460-4208
eISSN : 2549-7685

PRINSIP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA ABAD KE-21: PENDEKATAN MAZHAB INDONESIA (MANUNGGALISME)

Adi Rio Arianto
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Korespondensi: arianto.adirio@gmail.com

(Submission 22-08-2026, Revissions 05-10-2026, Accepted 15-10-2026)

Abstract

The principle of Indonesian Foreign Policy "Free and Active" faces major challenges in the era of Prabowo Subianto's administration. These challenges are closely related to Prabowo Subianto's way in exploring Indonesia, responding to the realities of 21st century world politics, and achieving Indonesia's interests through large-scale and dilemmatic foreign visits. By conducting an analysis of the evolution of Indonesia's foreign policy principles through the Indonesian School approach (Manunggalism), this article offers an alternative new map of Indonesia's foreign policy called the Haryamatra Manunggal principle. This study uses a qualitative method with an explanatory research type. The main data were extracted through literature studies reinforced with supporting data through historical manuscript searches. The principle of Indonesian foreign policy Haryamatra Manunggal emphasizes the values of "Kemanunggalan Dunia", namely gotong royong, kesatuan, and kerukunan dunia forming a "Manunggal Diplomacy." The principle of Haryamatra Manunggal has five pillars: (1) Poros Maritim Dunia, (2) Ekuilibrium Daratan Dunia (3) Poros Khatulistiwa Dunia, (4) Benua Indonesia, and (5) Daerah Manunggal Dunia (Manunggalika). The principle of "Haryamatra Manunggal" has a strong connection with the principle of Mitreka Satata during the Majapahit kingdom and the principle of Mercusuar initiated by Soekarno. From the combination of Mitreka Satata, Mercusuar, and Free and Active, the author offers Haryamatra Manunggal as an alternative in strengthening Indonesia's position in the 21st century.

Keywords: *The Principle of Indonesian Foreign Policy, Free and Active, Haryamatra Manunggal, Indonesian School, Manunggalism.*

Abstrak

Prinsip politik luar negeri Indonesia "Bebas Aktif" menghadapi tantangan besar di era pemerintahan Prabowo Subianto. Tantangan tersebut berkaitan erat dengan cara Prabowo Subianto menyelami Indonesia, menyikapi realitas politik dunia abad ke-21, dan mencapai kepentingan Indonesia melalui kunjungan luar negeri dalam skala besar dan dilematis. Dengan melakukan analisis terhadap evolusi prinsip politik luar negeri Indonesia melalui pendekatan Mazhab Indonesia (Manunggalisme), artikel ini menawarkan alternatif peta baru politik luar negeri Indonesia yang disebut sebagai prinsip *Haryamatra Manunggal*. Penelitian ini dirancang dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Data utama digali melalui studi pustaka diperkuat dengan data pendukung melalui penelusuran naskah sejarah. Prinsip politik luar negeri Indonesia "Haryamatra Manunggal" menawarkan nilai-nilai Kemanunggalan Dunia, yaitu: gotong royong, kesatuan, dan kerukuanan dunia membentuk "Diplomasi Manunggal". Prinsip *Haryamatra Manunggal* memiliki lima pilar: (1) Poros Maritim Dunia, (2) Ekuilibrium Daratan Dunia (3) Poros Khatulistiwa Dunia, (4) Benua Indonesia, dan (5) Daerah Manunggal Dunia (Manunggalika). Prinsip *Haryamatra Manunggal* memiliki pertalian kuat dengan prinsip Mitreka Satata di masa kerajaan Majapahit dan prinsip Mercusuar yang digagas oleh Soekarno. Dari pergumulan Mitreka Satata, Mercusuar, dan Bebas Aktif, penulis menawarkan *Haryamatra Manunggal* sebagai alternatif dalam memperkuat posisi Indonesia abad ke-21.

Kata Kunci: Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia, Bebas Aktif, Haryamatra Manunggal, Mazhab Indonesia, Manunggalisme.

pISSN : 2460-4208
eISSN : 2549-7685

PENDAHULUAN

Pada awal dasawarsa kedua abad ke-21, Profesor Dorodjatun Kuntjoro-Jakti memberikan pandangan terkait kemungkinan-kemungkinan keadaan Indonesia pada dasawarsa ketiga abad ke-21, dan kemudian memetakan kepentingan nasional Indonesia berkenaan dengan kebijakan luar negerinya di kawasan Asia Tenggara dan dunia (Kuntjoro-Jakti, 2012: 194). Dalam pandangan ditulis di buku "*Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21*", Prof. Kuntjoro-Jakti menekankan pentingnya visi bagi bangsa Indonesia modern, berkeadilan, dan berwibawa. Dalam usaha mempertahankan keberadaan bangsa Indonesia, pandangannya memberikan dua lakon (skenario) yang akan dihadapi oleh Indonesia, yaitu pertama, lakon "*Indonesia sebagai Raksasa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (PERBARA atau ASEAN) yang tidak berdaya*", dan kedua, lakon "*Indonesia Sebagai Pusat Kebangkitan Masyarakat PERBARA*" (Kuntjoro-Jakti, 2012: 203).

Jika dipahami lebih jauh, pandangan Prof. Kuntjoro-Jakti ini merupakan peringatan kepada para pemimpin bangsa Indonesia untuk waspada terhadap keberlanjutan bangsa Indonesia di dunia. Dengan memberikan gambaran tentang keadaan kawasan Asia Tenggara di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, Prof. Kuntjoro-Jakti memberikan penekanan bahwa Indonesia terus mempertahankan identitas dan jika perlu meningkatkan posisi Indonesia dengan cara memperkuat kebijakan luar negerinya. Hal ini dipandang sangat berdampak pada kepentingan dan strategi kebijakan luar negeri di level kawasan maupun di pentas dunia (Kuntjoro-Jakti, 2012: 132; Novotny, 2010: 61). Menurut penulis, ada tiga hal penting dalam pandangan Prof. Kuntjoro-Jakti tersebut, yaitu: prinsip kebijakan luar negeri Indonesia, kepentingan bangsa Indonesia, dan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai strategi untuk mencapai kepentingan tersebut.

Dalam salah satu tulisannya yang berjudul "*65 Tahun Hubungan Indonesia-Tiongkok*", Profesor Hasjim Djalal memberikan penekanan bahwa salah satu cara yang bisa ditempuh oleh Indonesia untuk mempertahankan eksistensinya adalah dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara serumpun dan saling berdekatan secara geografis. Salah satunya adalah menjalin kerjasama yang erat dengan Tiongkok (Djalal, 2015: 44). Pertimbangannya, menurut Prof. Djalal, karena Tiongkok merupakan bangsa yang sedang tumbuh, dan menjalin kerjasama dengan Tiongkok akan memberikan status politik Indonesia yang berkepanjangan. Model kerjasama yang dibangun mestilah berbasiskan perdamaian.

Selain itu, Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dalam bukunya berjudul "Membangun *Kembali Indonesia Raya: Strategi Besar Transformasi Bangsa*" menyampaikan pemikiran tentang bagaimana memperkuat visi Indonesia dalam istilah yang ia sebut sebagai strategi "Kebijakan Dorongan Besar" untuk mencapai kemakmuran Indonesia (Subianto, 2013: 132). Dalam pandangan Prabowo Subianto, strategi dalam mencapai kepentingan Indonesia sejak masa kemerdekaan mengalami stagnasi, oleh karenanya prinsip yang menyokong pelaksanaan strategi kebijakan luar negeri di masa kini perlu dimutakhirkan sesuai zaman (Subianto, 2013: 33-85).

Dengan memahami beberapa pandangan di atas, maka muncul suatu pertanyaan yang mendasar, yaitu: masih sesuaikah "Bebas Aktif" digunakan sebagai prinsip politik luar negeri Indonesia di masa sekarang? Jika masih sesuai, apa yang harus diperkuat? Jika sudah tidak sesuai apa dasar pertimbangannya? Dan, oleh karena itu, adakah alternatif prinsip baru?

Artikel ini membahas tentang pertanyaan di atas, dan sekaligus menawarkan gagasan baru dengan memahami beberapa pemikiran para ahli di bidang hubungan luar negeri, serta memberikan peta jalan untuk mengevaluasi prinsip "Bebas Aktif" di masa kini, terutama untuk memahami perkembangan kepentingan nasional Indonesia dan strategi mencapai kepentingan tersebut (Nainggolan, 2016: 77; Nugroho, 2013: 21; Prihatono, 2007: 47). Dalam kerangka ini, penulis mengajukan alternatif prinsip dengan mempertimbangkan keadaan dunia di masa kini, yaitu: prinsip *Haryamatra Manunggal*. Prinsip *Haryamatra Manunggal* merupakan rekomendasi alternatif bagi kebangkitan Indonesia melampaui prinsip Bebas Aktif di Era *Manunggalian* Abad ke-21. Prinsip *Haryamatra Manunggal* berusaha mendorong tercapainya visi "Indonesia sebagai Kekuatan Dunia Abad ke-21" naik secara bertahap dari kekuatan regional Asia Tenggara masa kini menuju Indonesia masa depan yang dipandang sebagai pemegang kunci politik, keamanan, dan perdamaian dunia abad ke-21 (Arianto, 2016).

Kebijakan luar negeri Indonesia bagaimanapun juga akan terus beririsan dengan kepentingan nasional Indonesia dimana nilai-nilai Pancasila akan selalu menjadi induk bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia (Suropati, Montratama, dan Sulaiman, 2018: 127; Latif, 2015: 223; Novotny, 2010: 299).

Prinsip *Haryamatra Manunggal* memiliki pertalian kuat dengan Prinsip "Mercusuar" yang digagas oleh Sukarno, yaitu membangun kekuatan poros Jakarta-Moskow-Peking. Prinsip juga identik dengan prinsip "*Mitreka Satata*" semasa Kerajaan Majapahit, yaitu prinsip yang berpedoman pada *persaudaraan yang satu* [*Manunggal*] *dengan dasar persamaan derajat*) mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, hidup berdampingan secara damai, dan persamaan derajat antarbangsa (Prapanca, 2015; Kriswanto, 2009; Abimanyu, 2013; Riana, 2009; Olthof, 1941). Prinsip Mercusuar adalah gagasan yang dicetuskan oleh Sukarno untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat di dunia dengan istilah "Indonesia sebagai bangsa yang sedang berkembang [*emerging power*]" (Novotny, 2010: 300). Adapun prinsip "*Mitreka Satata*" adalah prinsip luar negeri Kerajaan Majapahit yang mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, hidup berdampingan secara damai, dan persamaan derajat antarbangsa (Nurhayati, 2018; Prapanca, 2015 dalam *Kakawin Nagarakretagama pupuh* 15, bait 1).

Prinsip "*Haryamatra Manunggal*" merupakan jawaban atas harapan dari Sukarno, serta sebagai jalan untuk melanjutkan visi tersebut. Selain itu, prinsip "*Haryamatra Manunggal*" merupakan rangkaian baru bagi prinsip politik luar negeri Indonesia sebagai hasil evaluasi dari pelaksanaan prinsip "Bebas Aktif," dan karenanya, prinsip *Haryamatra Manunggal* didahului oleh "Bebas Aktif", yang berusaha menekankan potensi (lakon) kekuatan Indonesia di dunia. Prinsip "*Haryamatra Manunggal*" secara substansial perlahan telah berproses secara alamiah dalam beberapa kebijakan Indonesia di pentas dunia. Prinsip ini menjadi penting dalam memahami kebijakan luar negeri Indonesia di masa kini dan masa depan, terutama untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia harus memimpin dunia abad ke-21.

Kajian Teori

Interaksi negara di pentas dunia pada dasarnya tidak lepas dari kebijakan luar negeri (Martin, 2012). Hal tersebut bersifat reflektif dengan kebijakan domestik. Di sisi lain, menurut Djelantik, aktivitas kebijakan luar negeri tidak luput dari praktik kebijakan yang dijalankan oleh pejabat resmi perwakilan negara (Djelantik, 2008:13). Oleh karena itu, lingkup dari analisis kebijakan luar negeri terdiri dari upaya untuk memahami fenomena kebijakan luar negeri secara umum dan upayanya dalam mendefinisikan tradisi negara dari pemahaman terkait fenomena kebijakan luar negeri. Analisis kebijakan luar negeri merupakan sebuah cara untuk memahami kebijakan luar negeri melalui fenomena maupun subyek pengamatan. Sehingga, suatu perspektif digunakan untuk menganalisis prosesnya.

Terdapat beberapa perspektif atau pendekatan dalam memahami kebijakan luar negeri secara umum. Pendekatan pertama adalah realisme. Menurut Wohlforth (2012:36), realisme memiliki tiga asumsi inti, yaitu *groupism, egoism* dan *power-centrism*. Sebuah grup dalam bayangan realisme adalah sebuah negara dan kohesi grupnya adalah nasionalisme. Hal ini yang mendasari adanya konsep aliansi. Sementara *egoism* merupakan sifat dasar dari manusia. Egoisme berkaitan dengan kepentingan manusia yang dapat membentuk cara manusia tersebut berperilaku. Adapun *power-centrism* menganggap *power* sebagai fitur politik yang paling fundamental. Pemikiran realisme pada akhirnya membawa kebijakan luar negeri untuk lebih berorientasi kepada kelompok yang memiliki *power* besar. Dalam menganalis kebijakan luar negeri, pertanyaannya menyangkut perihal bagaimana seorang analis melihat dimana *power* yang sesungguhnya berada, apa saja kelompok kepentingannya, dan proses bertemunya kepentingan yang kadang saling bertentangan (Wohlforth, 2012:37).

Pendekatan kedua, liberalisme. Dalam memahami kebijakan luar negeri, pendekatan liberalisme memandang individu, kelompok sosial, dan lembaga politik dapat memberi efek pada kebijakan negara di pentas internasional (Doyle, 2012:54-55). Liberalisme lebih menekankan struktur domestik berdasarkan hubungan krusial antara individu, pasar, dan ekonomi suatu negara yang pada akhirnya menjadi ruang krusial bagi proyeksi kebijakan luar negeri. Penganut liberalisme telah mengklasifikasikan beberapa pandangan khusus terkait gaya politik luar negeri suatu negara, yakni *Lockean*, *Smithian*, dan *Kantian*. *Lockean* melihat perilaku negara lebih banyak diperlihatkan dalam bentuk representasi yang pada akhirnya memerlukan suatu persetujuan dari beberapa individu yang berkepetingan. Adapun *Smithian* didasarkan pada interaksi pasar (*market*) dan arus modal yang berujung pada praktik kapitalisme (*free trade*). Terakhir, *Kantian* memiliki klasifikasi yang dapat menjelaskan perilaku negara berdasarkan pendekatan kesetaraan individu dan pemerintah pemegang kekuasaan, yakni (1) perwakilan (republik); (2) perdamaian abadi dan non-diskriminasi; (3) mengharapkan ketergantungan sosial dan akumulasi ekonomi (Doyle, 2012:66-68).

pISSN : 2460-4208
eISSN : 2549-7685

Pendekatan ketiga, konstruktivisme yang memiliki empat kunci preposisi, yaitu (1) keyakinan dalam realitas yang telah terkonstruksi secara sosial dan responnya; (2) fokus pada norma (aturan) yang menjadi motor penggerak agen; (3) memahami bahwa identitas menjadi dasar utama penentu *logics of action*; (4) keyakinan terhadap *mutual constitutiveness* dari agen dan struktur, dan fokus pada praktik dan tindakan agen (Flockhart, 2012:82). Pendekatan konstruktivisme dapat dipakai ketika kedua pendekatan sebelumya tidak dapat menjelaskan fenomena kebijakan luar negeri sebuah aktor. Selanjutnya, dalam memahami kebijakan luar negeri, maka konstruktivisme memandang bahwa kebijakan luar negeri dapat dilangsungkan dan dipertahankan dengan cara menjaga nilai identitas sebagai sumber utama pengetahuan yang dimiliki bersama oleh sekelompok negara dalam bentuk organisasi (Flockhart, 2012:92).

Pendekatan keempat, poststrukturalisme yang menekankan pada diskursus dan pengetahuan. Dalam pandangan ini, identitas dipahami sebagai akibat dari struktur *power* dan terwujud melalui diskursus. Oleh sebab itu kaum postsrukturalis meyakini bahwa ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang dibangun (Hansen, 2012:95). Dalam praktik kebijakan luar negeri, diskursus (wacana) terhadap isu tertentu di tingkat internasional dapat menjadi pertimbangn sebuah negara dalam menetapkan kebijakan luar negeri. Diskursus kebijakan luar negeri harus lebih bersifat spesifik dalam memberikan representasi dari masalah yang akan dipecahkan lewat sebuah kebijakan. Analisis diskursus berusaha untuk menyediakan *road map* yang menunjukkan seakurat mungkin posisi kebijakan luar negeri yang utama dan representasi yang menopangnya (Hansen, 2012:107).

Dari beberapa uraian di atas, penulis mencoba memberikan pendekatan baru yang lebih khas Indonesia, yaitu Manunggalisme. Penulis secara terbuka mengajak untuk mendiskusikan pendekatan ini, yang tentu saja tidak akan terpaku pada satu pendekatan dan mengajak untuk mengelaborasi kekurangan dan kelebihan dalam menganalisis topik dimaksud. Para analis kebijakan luar negeri bisa saja berhadapan dengan lebih dari satu pendekatan dalam melihat satu fenomena. Karenanya, penulis menawarkan Manunggalisme sebagai khas pendekatan Mazhab Indonesia yang mencoba menganalisis prinsip politik luar negeri Indonesia abad ke-21. Pendekatan Manunggalisme dikembangkan Adi Rio Arianto dan Gesti Anggraini dalam karya "*Manunggalism: Paradigm, Philosophy, and Theory to View the World Relations (WR) Belong to Indonesian School (Mazhab Indonesia) in Manunggalian Era 21st Century*" (Arianto and Anggraini, 2023).

Manunggalisme merupakan pendekatan yang berusaha untuk memahami politik luar negeri dengan menawarkan "Teori Perdamaian Manunggal" dalam menjelaskan cara bangsa-bangsa membangun perdamaian dunia berdasarkan sifat "*Sistem Hubungan Dunia adalah Gotong Royong*" (Arianto dan Anggraini, 2023; Deklarasi Demak, 2024). Teori Perdamaian Manunggal dibutuhkan karena esensi gotong toyong diperkuat oleh esensi dan penerapan kesatuan dan harmoni (kerukunan) yang diharapkan dapat bermanfaat dalam menganalisis pendekatan perdamaian dunia dengan memahami asal-usul sifat manusia bangsa-bangsa Asia dan seluruh Dunia Timur termasuk Asia, Afrika, dan juga Eurasia. Uraian teori ini dipaparkan lebih lanjut dalam pembahasan sebagai penegasan pendekatan Mazhab Indonesia dalam analisis prinsip politik luar negeri Indonesia abad ke-21.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif mengingat permasalahan yang diteliti bersifat dinamis. Oleh karenanya data yang digunakan tidak berdasarkan angka-angka tertentu, melainkan kumpulan dari data-data yang bersifat kompleks. Data-data tersebut diperoleh dari data primer dan sekunder (Cresswell, 2016: 31). Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif adalah "prosedur penelitian yang bersifat deskriptif dimana sumber utama data dihasilkan dari narasumber secara lisan dan tulisan (Bogdan dan Taylor 2004). Sementara itu, menurut Cassel dan Simon, metode kualitatif adalah metode penelitian yang ditempuh dengan cara menggambarkan dan menafsirkan fenomena sosial menjadi sekumpulan informasi berdasarkan rangkaian dari sekumpulan simbol yang diinterprestasikan maknanya (Cassel dan Simon 2004).

Penelitian ini didukung dengan *field researches* (Bryman, 2012: 12), yaitu untuk menggali informasi lebih dalam tentang proyeksi prinsip politik luar negeri Indonesia abad ke-21 dari Bebas Aktif ke *Haryamatra Manunggal* dengan pendekatan Mazhab Indonesia (Manunggalisme). Adapun data bersumber dari dokumen resmi pemerintah Indonesia, praktik kebijakan yang tertulis dalam buku-buku

sejarah nasional, dan penelitian utama dari para akademisi baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan bidangnya yang relevan.

Penelitian terkait prinsip politik luar negeri Indonesia abad ke-21 dengan pendekatan Mazhab Indonesia (Manunggalisme) berfokus pada tiga hal pokok: (1).Melihat sikap dan pendirian prinsip Bebas Aktif selama Indonesia merdeka hingga sekarang; (2) Memahami maksud Prinsip "*Haryamatra Manunggal*" dan kaitannya dengan prinsip *Mitreka Satata* dan prinsip Mercusuar, dan (3).Memahami rangkaian baru prinsip *Haryamatra Manunggal* dalam mempersiapkan Indonesia sebagai kekuatan dunia di era Manunggalian abad ke-21.

PEMBAHASAN

Pendekatan Mazhab Indonesia (Manunggalisme)

Apa itu Manunggalisme? Manunggalisme adalah paradigma, filsafat, dan teori tentang melihat tatanan dunia (Hubungan Dunia) di Era Manunggalian (Pemurnian) dengan meng-arus-utamakan "*Sistem Hubungan Dunia adalah Gotong Royong*". Hal ini selanjutnya disebut sebagai pendekatan "Mazhab Indonesia dalam Hubungan Dunia" melampaui "Hubungan Internasional" *ala* Barat (Arianto dan Anggraini, 2023; Deklarasi Demak 2024). Prinsip Manunggalisme adalah sistem pemikiran ilmiah tentang bagaimana memandang Hubungan Dunia melalui Paradigma Dunia Timur dengan menggunakan Teori Besar Manunggalisme di bawah payung Mazhab Indonesia dan terkait dengan inisiasi teori dalam memahami tatanan dunia yaitu "Teori Hubungan Dunia Timur (*Eastern World Relations Theory*)" (Arianto dan Anggraini, 2025).

Manunggalisme memiliki beberapa teori turunan yang tersebar dan telah didiskusikan oleh *scholar* Indonesia dan juga sedang dalam proses pengembangan yaitu Teori Hubungan Dunia Timur, Teori Manularisme Dunia, Teori Perdamaian Manunggal (Manunggalistiwa), Geometripolitika (Geometripolitisasi), Keamanan Dunia Basis Kelima, Perang Geometri Antarbangsa, Manunggalisasi, serta teori-teori yang sedang dalam proses pengembangan dan penerapannya dalam studi kasus. Dalam proses pengembangan teori-teori di atas, Mazhab Indonesia telah menyelenggarakan "*Debat Pemurnian Hubungan Dunia Timur vs. Hubungan Internasional Barat 2026*" bersama dengan Perhimpunan Kajian Keamanan Dunia (PKKD). Debat Pemurnian 2026 dimaksudkan untuk menghadirkan pendekatan baru dalam memahami hubungan dunia dengan memperkenalkan Manunggalian, yaitu proses pemurnian dunia yang mulai diperkenalkan dan didiskusikan pada Kongres Perhimpunan Kajian Keamanan Dunia Ke-1 tahun 2022 dan Kongres Mazhab Indonesia Ke-1 tahun 2024.

Terdapat tujuh prinsip Manunggalisme sebagai sistem ide untuk memahami Hubungan Dunia sejalan dengan pengembangan "Teori Hubungan Dunia Timur" untuk diimplementasikan dalam memahami fenomena dunia. Prinsip tersebut secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuh Prinsip Manunggalisme

Tujuh Prinsip Manunggalisme	
1. *Adimanusiawi*	"Manusia adalah mahluk yang taat."
2. *Geometrisme*	"Manusia adalah mahluk geometris."
3. *Permusyawaratan*	"Manusia hidup dalam kesepakatan yang bulat."
4. *Kemanunggalan*	"Manusia hidup dalam gotong royong, kesatuan, dan kerukunan."
5. *Haryamatra*	"Manusia hidup dalam kemakmuran yang agung."
6. *Adibumi*	"Adibumi adalah sistem pemerintahan manunggal."
7. *Manupolitika*	"Sistem kepemimpinan/kekuasaan dikendalikan oleh lima lembaga."

Sumber: Adi Rio Arianto dan Gesti Anggraini (2023) "*Manunggalism: Paradigm, Philosophy, and Theory to View the World Relations (WR) Belong to Indonesian School (Mazhab Indonesia) in Manunggalian Era 21st Century*", UGM Digital Press (2023). Link: https://digitalpress.ugm.ac.id/article/433

pISSN : 2460-4208
eISSN : 2549-7685

Manunggalisme dapat digunakan untuk memahami bagaimana perilaku suatu bangsa atau negara dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan bangsa atau negara dalam tata hubungan dunia dimaknai bahwa bangsa dan negara perlu mencapai keseimbangan dunia untuk meraih kemakmuran yang agung. Dalam mencapai keseimbangan tersebut, suatu negara atau bangsa dapat melakukan ketiga hal berikut: *Pertama*, manunggalisme memberikan peta jalan agar negara atau bangsa dapat membaca proses terbentuknya "tatanan ruang" dunia. Tatanan ruang tersebut meliputi: darat, laut, udara, bawah tanah, khatulistiwa, ruang hampa, galaksi, dan siber. Manunggalisme memperkenalkan ruang khatulistiwa sebagai salah satu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mencapai kebutuhan dalam negeri dan luar ngerinya di abad ke-21. Hal ini penting mengingat secara geografis, garis khatulistiwa Indonesia adalah terpanjang di dunia. Mazhab Indonesia mendorong terbentuknya "Poros Khatulistiwa Dunia."

Kedua, manunggalisme memberikan peta jalan agar negara atau bangsa dapat mempelajari "Sifat Manusia" di dunia Timur dan Barat serta persinggungannya. Sifat manusia yang ditawarkan oleh Manunggalisme berpegang pada filsafat pemikiran bahwa "*Manungso niku makhluk sing manut* (Manusia adalah mahluk yang taat)". Mazhab Indonesia menjadikan ini sebagai pondasi atau dasar untuk memahami proses terbentuknya perilaku negara dan bangsa di pentas dunia dengan melihat perilaku manusia di negara atau bangsanya. Manunggalisme memperkenalkan prinsip *Haryamatra Manunggal* dengan mempertimbangkan bahwa pada dasarnya suatu negara atau bangsa dikendalikan oleh kelompok Komunal-Harmoni yang memiliki tekad yang kuat untuk bersatu mencapai kemakmuran bersama.

Ketiga, Manunggalisme menyiapkan peta jalan agar negara atau bangsa dapat memetakan "interval waktu" zaman. Manunggalisme menandai tahun 2000 sebagai era *Manunggalian* yaitu kebangkitan "kekuatan dunia" Timur. Manunggalian menandai proses "*Manunggalisasi* Dunia" *ala* Timur yaitu aktivitas Pemurnian dunia abad ke-21 menggantikan "*Globalisasi* Dunia" *ala* Barat. Mazhab Indonesia memberikan peta jalan bagi suatu negara atau bangsa dalam menjalankan kebijakan luar negerinya dengan memperhatikan secara seksama siklus alamiah pergantian kekuatan dunia, yaitu keruntuhan kekuatan dunia lama dan kebangkitan kekuatan dunia baru sesuai dengan garis waktunya yang oleh Mazhab Indonesia disebut dengan istilah Perdamaian Manunggal atau *"Manunggalistiwa*" (Arianto dan Anggraini, 2023).

Prinsip "Bebas Aktif" dan Penerapannya

Pemikiran Mohammad Hatta mengenai prinsip Bebas Aktif tertuang dalam pidatonya "*Mendayung Antara Dua Karang*". Hal ini diperkuat oleh Soekarno dalam pidatonya "*Revolusi Kita*" yang berbunyi "*Pendirian kita yang Bebas Aktif itu, secara setapak demi setapak harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri, agar supaya tidak berat sebelah ke Barat atau ke Timur*". Pada awalnya, Hatta menginginkan agar Indonesia menjadi penengah, juru damai, dan netral (non-blok). Namun pada perkembangannya Bebas Aktif telah kehilangan fungsinya (Nainggolan, 2016: 77).

Gagasan Hatta tentang Bebas Aktif dimaknai secara mendasar sebagai jalan untuk memperkenalkan Indonesia yang netral dan aktif mengkampanyekan perdamaian dunia di sela-sela terbentuknya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta dengan sekutunya masing-masing. Prinsip ini menandai perjalanan baru Indonesia di pentas dunia dengan harapan besar bahwa Indonesia dapat menjadi juru damai bagi bangsa-bangsa yang sedang berkonflik. Namun, pada kenyataannya, tujuan tersebut tidak tercapai. Indonesia akhirnya berada di dalam cengkeraman negara-negara besar di masa tersebut. Dan, prinsip Bebas Aktif dalam perjalananya belum bisa mencapai tujuannya.

Pada saat Perang Dingin berakhir, prinsip Bebas Aktif mulai kehilangan relevansinya bersamaan dengan bergantinya periode kepemimpinan Indonesia dari Soekarno ke Soeharto. Pada Era Orde Baru, Indonesia terlihat aktif dalam membangun kersajama dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Soeharto membuka kerjasama untuk eksplorasi kekayaan alam Indonesia yang mana kebijakan tersebut sangat bertolak belakang dengan makna Aktif yang diusung oleh Hatta dan Soekarno. Selain itu, Soeharto lebih condong berpihak kepada Amerika Serikat dibandingkan Uni Soviet. Di masa Soekarno, kerjasama dengan Uni Soviet sangat gencar dilakukan untuk mendukung prinsip Mercusuar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat kekuatan dunia melalui Gerakan Non-Blok tetapi hal tersebut masih belum cukup.

Di fase Reformasi, Indonesia justru mengalami kemunduran dalam memaknai Bebas Aktif, dimana Provinsi Timor Timur akhirnya melepaskan diri dari Indonesia karena pemaknaan Bebas di pemerintahan B.J. Habibie dimaknai sebagai memberikan kebebasan kepada wilayah tersebut untuk merdeka. Artinya, prinsip Bebas Aktif bagi Indonesia di masa tersebut hingga pasca reformasi telah kehilangan kekuatannya. Bahkan, prinsip Bebas Aktif kurang cocok dengan zaman saat ini. Kondisi ini mendorong Indonesia untuk mencari dukungan yang kuat. Pelaksanaan prinsip Bebas Aktif pada awalnya ditujukan agar Indonesia dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan internasional di saat Perang Dingin yang bergejolak, dimana terjadi persaingan ideologi dan militer dan memaksa dunia terbagi menjadi dua bagian yang saling bertentangan yaitu Blok Barat oleh Amerika Serikat dan sekutunya dan Blok Timur oleh Uni Soviet dan sekutunya (Novotny, 2010).

Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan prinsip Bebas Aktif Indonesia diterapkan secara berbeda-beda, tergantung siapa yang sedang memimpin sehingga menjadi relevan untuk direvisi. Prinsip "Bebas Aktif" bahkan dimaknai secara pragmatis oleh setiap pemimpin Indonesia yang memegang kendali pemerintahan dari sejak Indonesia merdeka. Termasuk, pemaknaan prinsip Bebas Aktif yang tidak konsisten oleh para pemimpin Indonesia saat dunia memasuki pasca Perang Dunia II hingga memasuki Perang Dingin, dan pada periode pasca Perang Dingin. "Bebas Aktif" tidak memiliki indikator ukur yang paten yang bisa dievalusi jika mengalami kekeliruan. Secara singkat, penerapan prinsip Bebas Aktif berdasarkan perjalanan sejarah pemimpin Indonesia bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penerapan Prinsip Bebas Aktif Indonesia

No.	Presiden	Fokus Utama Penerapan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
1	Soekarno	Menentang kolonialisme, memimpin Gerakan Non-Blok (GNB), dan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955.
2	Soeharto	Memulihkan hubungan diplomatik (Barat), mendirikan ASEAN (1967), dan menjadi ketua Gerakan Non-Blok pada tahun 1992
3	B.J. Habibie	Memulihkan citra Indonesia di mata internasional pasca-reformasi dan menyelesaikan konflik Timor Timur melalui referendum.
4	Abdurrahman Wahid (Gus Dur)	Melakukan diplomasi keliling dunia untuk membangun kembali dukungan internasional terhadap integrasi wilayah Indonesia.
5	Megawati Soekarnoputri	Menyeimbangkan hubungan dengan negara-negara besar (AS, Rusia, China) dan aktif dalam diplomasi antiterorisme global.
6	Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)	Mengusung doktrin "*Million friends, zero enemies*", aktif dalam forum ekonomi G20, serta mendirikan Bali Democracy Forum.
7	Joko Widodo (Jokowi)	Berfokus pada diplomasi ekonomi dan kedaulatan maritime (Poros Maritim Dunia), sukses menyelenggarakan KTT G20 (2022), serta melakukan misi perdamaian ke Rusia-Ukraina.
8	Prabowo Subianto	Menegaskan kembali posisi Non-Blok di tengah ketegangan geometripolitik global baru, serta berfokus pada kemitraan strategis pertahanan dan ekonomi yang seimbang, serta masuknya Indonesia dalam Keanggotan BRICS dan Dewan Perdamaian Gaza. Masih berproses.

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan penerapan kebijakan luar negeri para pemimpin di Indonesia di atas, penulis menilai bahwa Indonesia perlu untuk merumuskan prinsip yang baru, dengan rekam jejak Bebas Aktif yang masih releven tetap bisa dipertahankan seperti misi menjaga perdamaian, mencegah penjajahan baru,

dan menjaga ketertiban dunia sesuai dengan UUD 1945. Dalam kerangka ini penulis mengajukan prinsip *Haryamatra Manunggal* sebagai rangkaian baru bagi prinsip politik luar negeri Indonesia berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan prinsip "Bebas Aktif." Untuk menjelaskan bagaimana prinsip ini bekerja, maka pada Tabel 3 disajikan perbandingan filosofis *Haryamatra Manunggal* dengan prinsip-prinsip yang pernah diterapkan sebagi peta jalan kebijakan luar negeri Indonesia.

Tabel 3. Perbandingan Filosofis Mitreka Satata, Mercusuar, Bebas Aktif, & Haryamatra Manunggal

ASPEK	*Mitreka Satata*	*Mercusuar*	*Bebas Aktif*	*Haryamatra Manunggal*
Semboyan Utama	"Mitra Dalam Kesetaraan Bangsa-Bangsa"	"Indonesia Mercusuar Dunia"	"Mendayung di Antara Dua Karang"	"Indonesia Bangsa Manunggal: *Damai Di Semua Matra*."
Pondasi Filosofis	*Tat Twam Asi* & Mandala	Marhaenisme & Nasionalisme	Pragmatisme & Netralisme	Kemanunggalan Dunia & *Bhinneka Tunggal Ika*
Konsep Perdamaian	Perdamaian Nusantara (*Nusantara Peace*)	Perdamaian Indonesia (*Indonesian Peace*)	Perdamaian Non-Blok (*Non-Block Peace*)	Perdamaian Manunggal (*Manunggal Peace: Damai di semua matra*)
Doktrin Geopolitik ke Geometripolitik	Sumpah Palapa: Kerja sama Asia Tenggara kuno melahirkan wilayah Nusantara.	Poros Jakarta-Peking-Pyongyang, Poros Jakarta-Peking-Moskow, OLDEFO, NEFO, dan GANEFO.	Gerakan Non-Blok dan KAA (Konferesni Asia Afrika melahirkan ASEAN).	5 Pilar Haryamatra Manunggal: Poros Maritim, Poros Khatulistiwa, Ekuilibrium Daratan, Benua Indonesia, dan Manunggalika.
Pendekatan Diplomasi	Diplomasi persahabatan (persaudaraan yang sama).	Diplomasi konfrontatif & pembangunan monumental.	Diplomasi Non-Blok (melalui jalan penengah (konvensional).	Diplomasi Manunggal (kekuatan 8 matra, prioritas matra khatulistiwa dan maritim).
Dampak bagi Hubungan Internasional (HI) / Hubungan Dunia (HD)	-Regionalisme Stabil: Kawasan Asia Tenggara yang damai dan setara. -Maritim: Menekan laju bajak laut di	-Polarisasi Ekstrem: Dikotomi baru di luar Blok Barat & Timur. -Solidaritas: keluar dari PBB,	-Peredam Perang Dingin: Membentuk Gerakan Non-Blok (GNB). -Diplomasi Non-Blok:	Kekuatan Dunia Baru: Kedaulatan Maritim (Poros Maritim) dan hak orbit kedirgantaraan (Poros Khatulistiwa). -Geometripolitisasi: Indonesia mengontrol

	Selat Malaka kuno. -Sentralitas Ekonomi: Diakui sebagai *global trading hub* oleh Dinasti Yuan/Ming.	dekolonisasi Afrika. -Ketegangan Regional: Konfrontasi (Ganyang Malaysia).	Penengah yang jujur. -Ketergantungan Multilateral: Hukum internasional (PBB, UNCLOS).	urat nadi logistik dunia (*chokepoints*). -Sentralitas Multilateral: Indonesia (Nusantara) dan bangsa-bangsa Manunggal lainnya menjadi Pusat perdamaian dunia (*Manunggalika*).

Sumber: Diolah oleh penulis

Masing-masing prinsip sebagaimana diperbandingkan pada tabel di atas, merupakan prinsip kebijakan luar negeri yang pernah diterapkan di Indonesia atau era sebelumnya. Secara spesifik, masing-masing prinsip tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, prinsip Mitreka Satata. Prinsip ini termuat dalam kitab *Negarakertagama*. Berbeda dengan konsep Nusantara yang merupakan wilayah integrasi di bawah pengaruh langsung Majapahit, Mitreka Satata diterapkan untuk negara-negara sahabat di luar Nusantara (seperti Syam/Thailand, Ayodhya, Champa, Kamboja, dan Yavanna/Vietnam). Prinsip ini menempatkan kerajaan tetangga sebagai mitra sejajar, bukan bawahan. Hubungan ini didasarkan pada penghormatan kedaulatan masing-masing, kerja sama perdagangan maritim, dan jaminan keamanan bersama di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, prinsip Mercusuar. Di masa presiden Soekarno, Indonesia mengadopsi kebijakan luar negeri yang sangat revolusioner dan konfrontatif demi menegaskan eksistensi Indonesia di panggung global. Prinsip ini digerakkan oleh Soekarno dengan membagi dunia menjadi dua kekuatan: OLDEFO (*Old Established Forces*/negara-negara barat yang kapitalis-imperialis) dan NEFO (*New Emerging Forces*/negara-negara berkembang yang progresif). Indonesia memosisikan diri sebagai mercusuar (pemimpin) bagi kelompok NEFO untuk meruntuhkan dominasi Barat. Kebijakan ini melahirkan proyek-proyek arsitektur raksasa dan diplomasi olahraga berskala internasional.

Ketiga, politik Bebas Aktif. Prinsip ini pertama kali dicetuskan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 2 September 1948 dalam pidatonya yang terkenal, *"Mendayung di Antara Dua Karang"* di depan BP KNIP. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi objek dalam pertarungan politik internasional (saat itu antara Blok Barat AS dan Blok Timur Uni Soviet). Dengan menekankan pada Bebas, yaitu Indonesia menetapkan jalannya sendiri tanpa ikatan militer atau ideologi dengan blok adidaya manapun. Sementara Aktif, yaitu Indonesia tidak bersikap netral pasif (isolasionis), melainkan aktif meredakan ketegangan dunia dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah. Prinsip inilah yang hingga kini menjadi pedoman resmi politik luar negeri Indonesia.

Keempat, gagasan mengenai prinsip *Haryamatra Manunggal* sebagai sintesis atau penggabungan dari ketiga prinsip sebelumnya (Mitreka Satata, Mercusuar, dan Bebas Aktif) merupakan konsep baru. Secara konseptual, prinsip ini mengambil saripati dari masing-masing era sejarah Indonesia untuk membentuk satu model prinsip yang utuh. Kata *Haryamatra* merujuk pada pencapaian kejayaan/kemakmuran besar di semua matra (geometripolitik), sementara *Manunggal* berarti persatuan dan keselarasan yang utuh (Arianto dan Anggraini, 2023). Bagaimana *Haryamatra Manunggal* menggabungkan ketiganya?

Prinsip *Haryamatra Manunggal* bertindak sebagai payung integratif dengan menyerap keunggulan masing-masing formula politik luar negeri sejarah Indonesia:

1. Menyerap esensi *Mitreka Satata* (kesetaraan dan harmoni): *Haryamatra Manunggal* mempertahankan nilai bahwa Indonesia harus membangun kemitraan yang setara dan saling menghormati dengan negara tetangga. Hubungan antarbangsa didasarkan pada prinsip gotong royong, kesatuan, dan kerukunan bangsa-bangsa (nilai *kemanunggalan dunia*) untuk menjaga keseimbangan kawasan maritim dan geometripolitik dunia, bukan atas dasar penaklukan.

pISSN : 2460-4208
eISSN : 2549-7685

2. Menyerap ambisi Mercusuar (kepemimpinan dunia): Konsep ini tidak ingin Indonesia sekadar menjadi pengikut di panggung internasional. Mengambil semangat *Haryamatra* (mengejar kemakmuran dan kepemimpinan besar), prinsip ini melanjutkan impian Soekarno agar Indonesia menjadi pemandu (mercusuar) arus peradaban dunia, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif, damai, dan berbasis keunggulan multidimensi.
3. Menyerap strategi Bebas Aktif (independensi dan perdamaian): Sebagai penyeimbang, *Haryamatra Manunggal* mengunci posisi Indonesia agar tetap berdiri mandiri ("Bebas") di atas kaki sendiri tanpa terjebak pengaruh bangsa-bangsa yang tidak serumpun. Di saat yang sama, menuntut keterlibatan tegas ("Aktif") dalam meredakan ketegangan dunia dan merajut perdamaian dunia."
4. Menggabungkan ketiganya (Mitreka Satata, Mercusuar, dan Bebas Aktif), *Haryamatra Manunggal* memproyeksikan Indonesia sebagai bangsa yang independen (Bebas Aktif), dihormati sebagai pemimpin dunia yang disegani (Mercusuar), namun tetap bersahabat secara adil dan setara dengan para mitranya (Mitreka Satata). Itulah Bangsa Manunggal yang divisikan oleh Mazhab Indonesia melalui prinsip Haryamatra Manunggal dengan semboyan "Indonesia Bangsa Manunggal, damai di semua matra, dengan garis khatulistiwa terpanjang dan pulau terbanyak sebagai bangsa terkuat di dunia"

Berdasarkan penjabaran di atas, maka bisa dirumuskan bahwa prinsip *Haryamatra Manunggal* adalah jalan paripurna dari evolusi sejarah politik luar negeri Indonesia. Prinsip ini meleburkan ketulusan kesetaraan Mitreka Satata (Majapahit), keberanian visi prinsip Mercusuar (Soekarno), dan ketegasan independensi Bebas Aktif (Hatta) ke dalam satu kesatuan kekuatan multidimensi yang berakar pada kodrat geografis bangsa Indonesia. Dengan semboyan "Indonesia Bangsa Manunggal, damai di semua matra, dengan garis khatulistiwa terpanjang dan pulau terbanyak sebagai bangsa terkuat di dunia," maka kita bisa membangun paradigma baru bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak lagi diukur dari kekuatan destruktif militerisme, melainkan dari manunggalnya (menyatunya) seluruh matra strategis dunia yaitu darat, laut, udara, bawah tanah, khatulistiwa, galaksi, ruang hampa, dan siber. Indonesia tidak perlu menaklukkan bangsa lain untuk menjadi kuat. Indonesia hanya perlu memimpin dengan cara gotong royong, mengelola, dan mempertahankan apa yang telah dianugerahkan alam semesta kepada Indonesia untuk membangun arah peradaban dunia di masa kini dan masa depan.

Prinsip "Haryamatra Manunggal": Lima Pilar Mencapai Kekuatan Dunia

Dalam rangka melepaskan Indonesia dari jebakan konteks Perang Dingin yang sudah tidak relevan lagi, gagasan tentang prinsip *Haryamatra Manunggal* sebagai rangakain baru prinsip politik luar negeri Indonesia, pada dasarnya berkaitan erat dengan prinsip Mitreka Satata periode Majapahit dan prinsip Mercusuar yang digagas oleh Soekarno. Ketiga prinsip ini memiliki nilai-nilai filosofis yang berbeda dengan prinsip Bebas Aktif yang digagas oleh Mohammad Hatta. Dan, di zaman sekarang, ketiga prinsip tersebut relevansinya menjadi jauh lebih kuat.

Keterhubungan antara prinsip *Haryamatra Manunggal ala* Mazhab Indonesia abad ke-21, prinsip Mitreka Satata *ala* Majapahit, dan prinsip Mercusuar *ala* Soekarno abad ke-20 adalah menyongsong tercapainya visi "Indonesia sebagai Kekuatan Dunia Abad ke-21". Ini tentu saja melampaui prinsip Bebas Aktif *ala* Hatta yang hanya berfokus pada mengamankan kepentingan Indonesia "di antara dua kekuatan besar (Blok Timur dan Blok Barat)". Prinsip *Haryamatra Manunggal* berfokus pada penguatan pengaruh Indonesia di Asia Tenggara mencapai kekuatan besar di dunia melalui suatu jalur yang disebut sebagai "*Diplomasi Manunggal"* (Arianto dan Anggraini, 2020). Agenda utama prinsip *Haryamatra Manunggal ala* Mazhab Indonesia (Manunggalisme) abad ke-21 adalah Indonesia mampu menjadi pusat kekuatan dunia di segala bidang bersama dengan bangsa-bangsa Timur lainnya.

Harus diakui bahwa prinsip Mercusuar adalah cermin kekuatan Indonesia di abad ke-20. Namun, perlu dipahami pula bahwa prinsip Mercusuar tidak dapat berjalan dengan baik di abad ke-20, karena belum momentumnya, dan belum menjadi lingkungan strategiknya. Prinsip Mercusuar mesti dievaluasi dengan menghadirkan prinsip *Haryamatra Manunggal* yang memiliki kecocokan untuk mendorong terciptanya keseimbangan tiga poros dunia, yaitu Poros Maritim Dunia, Ekuilibrium Daratan Dunia, dan Poros Khatulistiwa Dunia (Arianto, 2017). Ketiga poros ini akan membentuk kekuatan Daerah Manunggal Dunia (*Manunggalika*) dan juga terbentuknya Benua Indonesia. Mencermati hal ini, prinsip

pISSN : 2460-4208
eISSN : 2549-7685

Bebas Aktif selama ini tidak pernah mencerminkan prinsip Mercusuar dan prinsip Mitreka Satata. Prinsip Bebas Aktif tidak punya pertalian dengan kedua prinsip di atas, dan karenanya penulis menawarkan gagasan agar Indonesia dapat merangkai kembali prinsip politik luar negeri yang baru, yaitu *Haryamatra Manunggal* yang didukung dengan "Diplomasi Manunggal" (Arianto dan Anggraini, 2020).

Prinsip *Haryamatra Manunggal* berusaha menegaskan kekuatan Indonesia secara konsisten dalam hal Poros Maritim Dunia, Ekuilibrium Daratan Dunia, dan Poros Khatulistiwa Dunia. Prinsip ini sekaligus memperkuat kembali prinsip Mercusuar *ala* Sukarno di abad ke-21. Tarikannnya dengan pemikiran prinsip Mercusuar adalah bagaimana lingkungan domestik Indonesia mampu membentuk lingkungan strategik global dunia abad ke-21. Meminjam andagium Sun Tzu, dalam situasi ini, Tiongkok memainkan filosofi Sun Tzu dalam melihat posisi Indonesia yang berpeluang besar bisa menaikkan kekuatan bersama di pentas dunia dengan menggandeng Indonesia dalam program Jalur Sutra Abad Ke-21.

Tiongkok telah aktif bergerak dalam mengorganisir institusi secara multilareral, yaitu mengikat secara permanen semua negara-negara ASEAN, yang secara struktural dilakukan lewat ACFTA. Selain itu, membangun BRICS dari dalam dan juga memastikan agar bangsa utama (meminjam istilah Al Farabi dan Kerajaan Majapahit) rumpun Timur, termasuk dalam hal ini adalah Indonesia, dinaikkan ke level dunia, agar lebih kuat terhadap berbagai situasi tekanan lingkungan strategik global abad ke-21. Inilah kombinasi peta jalan prinsip *Haryamatra Manunggal*, Mitreka Satata, dan Mercusuar untuk disatukan di abad ke-21. Kebangkitan Indonesia bersamaan dengan kebangkitan Tiongkok, dan bangsa Manunggal lainnya (Bijian, 2015 dalam Rahardjo). Prinsip *Haryamatra Manunggal* melambangkan fenomena pertumbuhan kekuatan Indonesia di pentas dunia. Itulah gotong royong bangsa Manunggal (Arianto dan Anggraini, 2020).

Pada akhirnya, kita bisa memahami, mengapa Soekarno membangun Poros Jakarta-Moskow-Peking, salah satunya adalah untuk menyatukan dunia Timur agar mampu mengimbangi dan melampaui dunia Barat (peradaban *Atlantikal*) yang begitu agresif dan ingin terus menjajah negara-negara Timur lainnya (Menzies, 2002). Hanya saja, saat poros tersebut dibangun, *Pax Americana* sedang berada di titik puncak/balik. Sehingga, poros yang dibangun oleh Soekarno melalui prinsip Mercusuar tidak mampu menjadi kekuatan. Hal tersebut disebabkan karena pada periode di abad ke-20, interval waktu masih bukan milik bangsa Timur, dan baru pada permulaan abad ke-21 bisa dikatakan milik bangsa Manunggal (genap 700 tahun). Sebagai akibatnya, prinsip Mercusuar *ala* Soekarno tidak dapat berjalan efektif di abad ke-20 tetapi semangatnya sangat kuat dan dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi kebangkitan Indonesia.

Oleh karena itu, prinsip *Haryamatra Manunggal* mesti hadir dan *Manunggalisasi,* yaitu proses pemurnian dunia abad ke-21 di bidang sejarah, peradaban, kebudayaan, tradisi, filsafat, ideologi, masyarakat, dan manusia dapat berjalan sesuai dengan semangat zaman masa kini. Semboyan "Indonesia Bangsa Manunggal, damai di semua matra, dengan garis khatulistiwa terpanjang dan pulau terbanyak sebagai bangsa terkuat di dunia," pada dasarnya merupakan lima pilar dalam Haryamatra Manunggal. Kelima pilar tersebut adalah: (1) Poros Maritim Dunia, (2) Ekuilibrium Daratan Dunia, (3) Poros Khatulistiwa Dunia, (4) Benua Indonesia, dan (5) Daerah Manunggal Dunia (*Manunggalika*). Lima pilar tersebut dijalankan oleh Indonesia melalui Diplomasi Manunggal yaitu *Manunggal Diplomacy* as *Central Geometripolitical Diplomacy* (Arianto dan Anggraini, 2020). Metode ini menghapus batas-batas kaku antara diplomasi politik, militer, ekonomi, budaya, dan teknologi. Adapun jalan strategis yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam diplomasi manunggal meliputi:

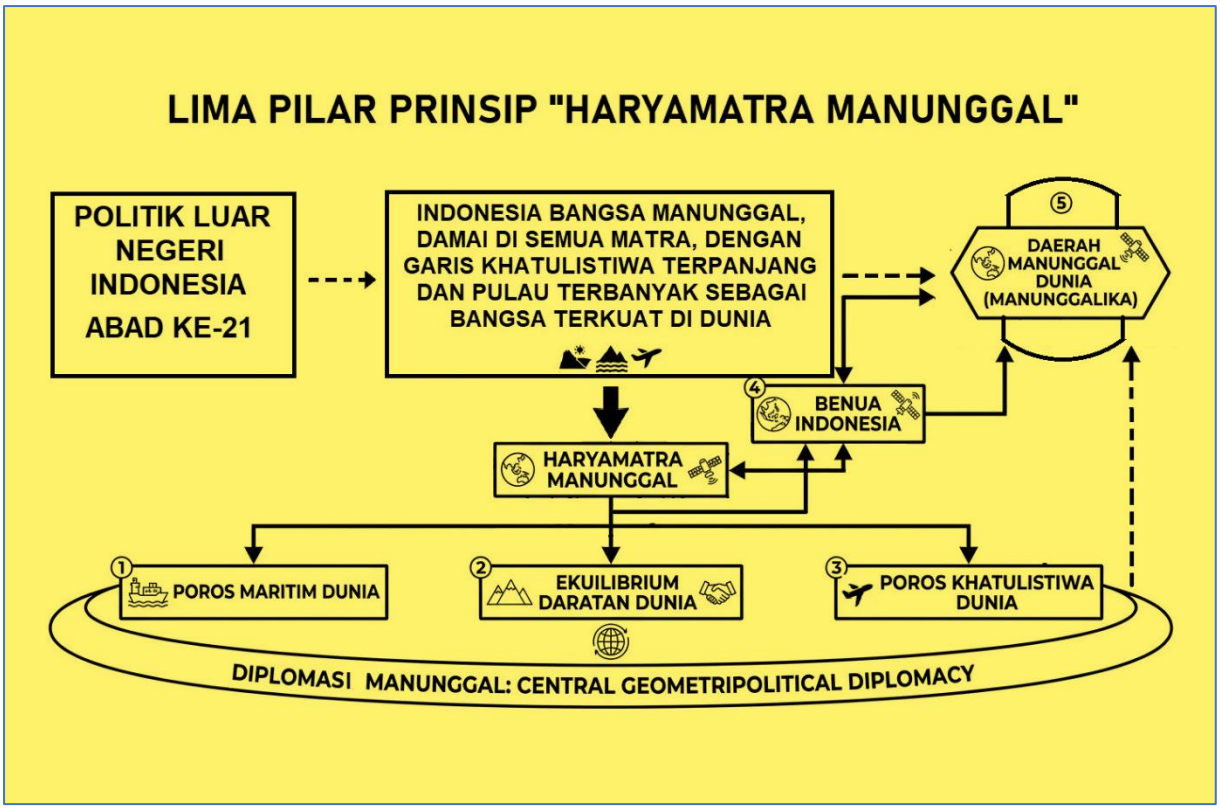
1. Memperkuat Keamanan Khatulistiwa dan Keamanan Maritim (*Equator and Maritime Security*) secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Indonesia tidak lagi sekadar pasif mengikuti hukum internasional (seperti UNCLOS atau regulasi ruang udara ICAO). Indonesia sebaiknya menggunakan posisi tawarnya sebagai pemilik benteng khatulistiwa terpanjang dan kepulauan terbesar di dunia untuk menginisiasi regulasi global baru yang mendukung kebutuhan bangsa Indonesia. Jika ruang khatulistiwa atau ruang maritim Indonesia terganggu, maka keseimbangan global akan ikut terganggu.
2. Memainkan posisi tawar Geometripolitik Indonesia (*Geometripolitical Leverage*) dengan menciptakan negosiasi di forum internasional (PBB, G20, ASEAN, BRICS, dan forum strategis lainnya) agar diplomasi manunggal Indonesia bergerak dengan prinsip "damai di semua matra"

(darat, laut, udara, bawah tanah, khatulistiwa, ruang hampa, galaksi, dan siber). Praktik diplomasi manunggal selalu mempertimbangkan ekologi (alam semesta), ekonomi, politik, dan keamanan dunia yang bergantung langsung pada stabilitas Indonesia baik di tingkat kawasan (*kerukunan kawasan)* maupun dunia (*kerukunan dunia)*.

3. Menjaga Geometripolitisasi Indonesia berjalan dalam koridor yang tepat yaitu kebijakan mentransformasikan seluruh matra strategis menjadi sebuah kekuatan yang terukur untuk membentengi Indonesia secara keseluruhan "damai di semua matra" yaitu "*Central Geometripolitical Diplomacy*" berupa: pemerataan keterhubungan seluruh pulau demi menegakkan proros maritim dunia, penguatan infrastruktur langit Indonesia demi menegakkan poros khatulistiwa dunia, dan perluasan kerja sama multilateral-serumpun demi menegakkan ekuilibirum daratan dunia. Jika Geometripolitisasi Indonesia berjalan maksimal, maka kombinasi kekuatan di dalam negeri dan luar negeri menjadi peluru utama Indonesia di dunia terutama untuk mencapai Benua Indonesia dan Manunggalika.

Adapun, proyeksi lima pilar prinsip *Haryamatra Manunggal* dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. *Lima Pilar Prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia "Haryamatra Manunggal"*



Secara skematik, bagaimana lima pilar tersebut bekerja, secara argumentatif bisa diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, Poros Maritim Dunia. Dalam hal ini, terdapat keuntungan yang sangat besar saat skema Poros Maritim Dunia berjalan beriringan dengan skema *Belt and Road Initiative* (BRI). Penggabungan visi kedua skema menjadikan Indonesia diakui secara kedaulatan maritim (Arianto, 2017). Sedangkan, Tiongkok diakui sebagai Poros Daratan Dunia. Skema *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan proyek Raksasa Tiongkok pada abad ke-21 sekaligus sebagai salah satu bagian dari visi besar Dunia Timur dimana jalurnya melewati daratan menghubungan beberapa benua (Xinhuanet, 2014). Inti dari *Poros Maritim Dunia* adalah bahwa Indonesia menjadikan jaringan belasan ribu pulaunya sebagai benteng logistik, pangan, dan energi dunia melalui strategi pengendalian mutlak atas seluruh jalur pelayaran internasional (*chokepoints* seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan

pISSN : 2460-4208
eISSN : 2549-7685

Selat Makassar hingga Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan) guna mengontrol arus rantai pasok global.

Kedua, Ekuilibrium Daratan Dunia. Rusia dan Tiongkok merupakan Kawasan Daratan Dunia yang secara geografis wilayahnya tidak memiliki kawasan laut sempurna "*Half Land-Lock"*. Kedua negara tersebut merupakan kawasan yang sebagian besar wilayahnya terkunci oleh daratan. Satu-satunya cara menjelajah sektor kelautan adalah berbagi dengan negara-negara tetangga atau negara-negara yang setidaknya memiliki wilayah laut sempurna. Inilah kekuatan Indonesia yang tidak dimiliki oleh Rusia dan Tiongkok, yaitu aktivitas-aktivitas yang berorientasi pada sektor Maritim. Namun demikian, kedua negara ini merupakan "Pusat Daratan Dunia." Karenanya, kerjasama Rusia, Tiongkok, dan Indonesia bisa menghasilkan garis keseimbangan antara Poros Maritim Dunia dan Poros Daratan Dunia. Penggabungan kekuatan inilah yang disebut sebagai Ekuilibrium Daratan Dunia. Hadirnya kekuatan Tiongkok di Asia, terutama di Laut Tiongkok Selatan secara geopolitik menguntungkan Indonesia sebab melegitimasi kekuatan regional kawasan dan lebih leluasa terhubung dengan negara-negara maju.

Lagipula, Rusia dan Tiongkok adalah dua negara yang tergabung di G20 dan BRICS. Dengan terus menjalin hubungan dengan Tiongkok dan Rusia, maka dalam jangka Panjang akan menguntungkan Indonesia di pentas regional dan pentas dunia. Inti dari *Ekuilibrium Daratan Dunia* adalah Indonesia menjadi jangkar stabilitas yang menyeimbangkan ambisi kekuatan-kekuatan besar dunia yang berbasis di daratan (benua) dengan strategi memanfaatkan bentang kepulauan Indonesia sebagai *buffer zone* (zona penyangga) geometripolitik, memastikan tidak ada satu pun kekuatan global kontinental yang dapat mendominasi kawasan Asia-Pasifik dan seluruh dunia secara unilateral dan mendorong gotong royong regional dan dunia.

Ketiga, Poros Khatulistiwa Dunia. Pendekatan Mazhab Indonesia (Manunggalisme) dalam salah satu teorinya yaitu Geometripolitika membagi wilayah dunia menjadi delapan matra, yaitu darat (Kuadran I), udara (kuadran II), laut (kuadran III), bawah tanah (kuadran IV), serta empat jenis medan geometri atau volume, yaitu ruang hampa, galaksi, siber, dan khatulistiwa (Arianto, 2016). Khatulistiwa adalah salah satu medan penting yang dimiliki oleh Indonesia di dunia, khususnya di Asia Tenggara, terutama ASEAN. Secara geografis Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang dilewati oleh garis Khatulistiwa. Indonesia adalah negara yang dilewati oleh garis Khatulistiwa terpanjang di dunia. Dengan status ini, maka posisi Indonesia di ASEAN dan dunia menjadi lebih kuat. Inti dari *Poros Khatulistiwa Dunia* adalah Indonesia menguasai bentangan ruang udara dan ruang angkasa geo-stasioner (Geostationary Orbit/GSO) terpanjang di dunia dan memastikan penggunaannya berdasarkan kehendak dari bangsa Indonesia memalui strategi menjadikan Indonesia sebagai pusat komando navigasi udara global, pusat riset perubahan iklim, serta hub utama peluncuran teknologi antariksa internasional karena efisiensi peluncuran dari garis ekuator terpanjang.

Keempat, Benua Indonesia. Posisi Indonesia sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara dan Pasifik mesti ditata sekali lagi sebelum menjadi kekuatan dunia. Ini menuntut Indonesia untuk lebih banyak memperkuat prinsip *Haryamatra Manunggal*. Indonesia sudah seharusnya mengaktifkan semua pilar ini. Secara implisit bisa dilakukan dengan menciptakan "pengaruh" terhadap negara-negara terdekat, lalu menilai respon yang muncul. Selain itu, pertumbuhan Rusia dan Tiongkok mesti diperhatikan. Indonesia perlu terus mengafirmasi diri karena masa depan dunia bertumpu pada kekuatan kerjasama Poros Maritim Dunia, Ekuilibrium Daratan Dunia, dan Poros Khatulistiwa Dunia. Inti dari *Benua Indonesia* adalah Indonesia meruntuhkan stigma psikologis bahwa Indonesia adalah "negara kepulauan kecil yang terfragmentasi" melalui strategi mendorong cara pandang baru di panggung dunia bahwa Indonesia adalah sebuah Benua "Maritim-Dirgantara" Indonesia (*Mega Equator-Maritime Continent*) yang utuh, masif, dan memiliki pengaruh setara dengan benua daratan manapun di bumi.

Kelima, Daerah Manunggal Dunia (Manunggalika). Manunggalika adalah wilayah teduh dunia sepanjang abad abad ke-21 hingga awal abad ke-28 yang dibentuk oleh Perdamaian Manunggal (Asia, Afrika, dan Eurasia) di seluruh dunia. Ini disebut sebagai perdamaian tingkat dunia yang menjadi dasar bagi "Perdamaian Manunggal". Periode *Manunggalisasi* adalah proses pemurnian dunia di bawah kendali kepemimpinan bangsa Manunggal yang dimulai pada abad ke-21 sebagai akhir dari "Pasca Perang Dingin", tepatnya tahun 2000. *Manunggalisasi* ala Timur menggantikan *Globalisasi* ala Barat.

Sebagai wilayah teduh dunia, Manunggalika terdiri dari "Poros Daratan Dunia" yang meliputi Rusia (Eurasia), Tiongkok, India, Mongolia, dan Mesir. Manunggalika merupakan penggabungan antara

pISSN : 2460-4208
eISSN : 2549-7685

wilayah Poros Maritim Dunia, Poros Daratan Dunia, Poros Khatulistiwa Dunia, Benua Indonesia, dan Daerah Manunggal Dunia (Manunggalika itu sendiri). Dengan demikian komposisi dasar bangsa Manunggal meliputi Tiongkok, Rusia, India, Indonesia, Mongolia, dan Mesir yang selanjutnya menjadi kerangka kekuatan dunia sebagai implementasi dari konsep "Arsitektur Tatanan Dunia —Tiongkok, Rusia, Indonesia, India, Mongolia dan Mesir, termasuk seluruh wilayah benua Asia, Afrika dan Eurasia (disingkat TRIIMAAE) menuju penggabungan seluruh "kekuatan regional" dan "kekuatan antarbenua" sebagai calon kekuatan dunia masa depan (Arianto, 2016).

Kawasan ini mewakili proyeksi kekuatan negara-negara dan bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Eurasia sebagai negara-negara utama bangsa Manunggal. Penggabungan seluruh kekuatan negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia Timur menjadi satu "kekuatan dunia" yang terikat kokoh dan saling terhubung antar-kawasan Asia, Afrika, dan Eurasia tanpa dibatasi oleh "Pagar Geometripolitika." Dengan demikian, maka "Daerah Manunggal Dunia (Manunggalika)" bisa tumbuh lebih kuat (Arianto 2016). Inti dari *Daerah Manunggal Dunia (Manunggalika)* adalah Indonesia menciptakan ruang pengaruh Geometripolitik global di mana Indonesia bertindak sebagai pusat perdamaian dunia melalui strategi menjadikan Indonesia (Nusantara) sebagai pusat mediasi konflik global, tempat di mana kepentingan-kepentingan dunia yang bertabrakan disatukan dan diredam demi kemaslahatan Bersama berdasarkan prinsip "damai di semua matra" dari Haryamatra Manunggal.

Sebagai kunci memahami *prinsip Haryamatra Manunggal*, dapat disimpulkan bahwa Poros Maritim Dunia adalah Indonesia; Ekuilibrium Daratan Dunia adalah Indonesia; Poros Khatulistiwa Dunia adalah Indonesia; Benua Indonesia adalah Indonesia sebagai benua termuda di dunia; dan Daerah Manunggal Dunia (*Manunggalika*) adalah gabungan seluruh kekuatan bangsa-bangsa benua Asia, Afrika, dan Erurasia. Oleh karena itu menjadi penting untuk menguasai Daerah Manunggal Dunia (*Manunggalika*) di dunia. Jika, Indonesia telah mampu memegang kekuatan Maritim, kekuatan Ekuilibrium, kekuatan Khatulistiwa, Benua Indonesia, hingga terbentuknya wilayah induk Daerah Manunggal Dunia (*Manunggalika)*, maka hal itu berarti Indonesia telah mencapai *Haryamatra Manunggal* sebagai Bangsa Manunggal Dunia.

Dengan argumen-argumen yang telah diuraikan, maka penulis meyakini akan munculnya maksim atau doktrin Geometripolitika yang baru, yaitu: "*Siapa yang menguasai Poros Maritim Dunia, Ekuilibrium Daratan Dunia, dan Poros Khatulistiwa Dunia akan menguasai Benua Indonesia; Siapa yang menguasai Benua Indonesia sebagai benua termuda di dunia akan menguasai Daerah Manunggal Dunia (Manunggalika); Siapa yang menguasai Daerah Manunggal Dunia (Manunggalika) akan menguasai Dunia; Keamanan Dunia telah bergeser dari Euro-Atlantik (Daerah Atlantik Dunia) ke Asia-Pasifik (Daerah Manunggal Dunia); Era Manunggalian (Pemurnian) adalah Era Kemakmuran Bangsa Manunggal: Asia, Afrika dan Eurasia*."

SIMPULAN

Terdapat keterhubungan yang sangat kuat antara prinsip *Haryamatra Manunggal ala* Mazhab Indonesia abad ke-21, prinsip Mitreka Satata *ala* Majapahit, dan prinsip "Mercusuar" *ala* Sukarno abad ke-20. Prinsip Bebas Aktif sudah berusaha menjalankan fungsinya pada awal-awal Indonesia merdeka yaitu berusaha menjaga netralitas, tetapi pada kenyataannya justru Indonesia sering kali tidak netral. Prinsip *Haryamatra Manunggal* berusaha menyongsong tercapainya visi "Indonesia sebagai Kekuatan Dunia Abad ke-21" melampaui prinsip Bebas Aktif *ala* Hatta yang hanya berfokus pada mengamankan posisi politik Indonesia "di antara dua kekuatan besar (Blok Timur dan Blok Barat)" dalam konteks Perang Dingin.

Selanjutnya, prinsip *Haryamatra Manunggal* berfokus pada penguatan pengaruh Indonesia di Asia Tenggara dan terus berusaha meningkatkan pertumbuhan kekuatannya di pentas dunia melalui suatu jalur yang disebut sebagai "*Diplomasi Manunggal"*. Agenda utama prinsip *Haryamatra Manunggal ala* Mazhab Indonesia (Manunggalisme) abad ke-21 adalah Indonesia mampu menjadi pusat kekuatan dunia di segala bidang bersama dengan bangsa-bangsa Timur lainnya. Prinsip *Haryamatra Manunggal* mesti hadir dan Manunggalisasi dunia mesti berjalan. Dengan semboyan "Indonesia Bangsa Manunggal, damai di semua matra, dengan garis khatulistiwa terpanjang dan pulau terbanyak sebagai bangsa terkuat di dunia," prinsip *Haryamatra Manunggal* akan membentuk lima pilar yaitu: (1) Poros Maritim Dunia, (2) Ekuilibrium Daratan Dunia, (3) Poros Khatulistiwa Dunia, (4) Benua Indonesia, dan (5) Daerah Manunggal Dunia (Manunggalika).

pISSN : 2460-4208
eISSN : 2549-7685

Pada akhirnya, dalam memahami prinsip *Haryamatra Manunggal*, dapat ditarik sebuah intisari bahwa Poros Maritim Dunia adalah Indonesia; Ekuilibrium Daratan Dunia adalah Indonesia; Poros Khatulistiwa Dunia adalah Indonesia; Benua Indonesia adalah Indonesia sebagai benua termuda di dunia; dan Daerah Manunggal Dunia (*Manunggalika*) adalah gabungan seluruh kekuatan bangsa-bangsa benua Asia, Afrika, dan Erurasia. Oleh karena itu menjadi penting untuk menguasai Daerah Manunggal Dunia (*Manunggalika*) di dunia. Jika, Indonesia telah mampu memegang kekuatan Maritim, kekuatan Ekuilibrium, kekuatan Khatulistiwa, Benua Indonesia, hingga terbentuknya wilayah induk Daerah Manunggal Dunia (*Manunggalika)*, maka hal itu berarti Indonesia telah mencapai *Haryamatra Manunggal* di pentas dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, Soecipto. 2013. *Babad Tanah Jawi*. Yogyakarta: Laksana.

Anne W. Brascomb (ed), *Toward A Law of Global Communication Network*, New York: Lognman, 1986.

Arianto, Adi Rio, and Gesti Anggraini. 2019. "Building Indonesia's National Cyber Defense And Security to Face the Global Cyber Threats Through Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)." *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara,* Vol. 9, No. 1, 2019. Journal link: https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/515/JPBHV9N1EA2

Arianto, Adi Rio, and Gesti Anggraini. 2020. "Manunggalism and the World Order in the Era of Manunggal 21st Century: The Role of Indonesia-China Cultural Cooperation in Building the Future of World Security Architecture by Promoting the Values of Mutual Cooperation Gotong Royong, Unity, and Harmony." *Center for Southeast Asian Social Studies Universitas Gadjah Mada,* 2020. Journal link: https://pssat.ugm.ac.id/conference-proceeding-symposium-on-social-science-rethinking-the-social-world-in-the-21st-century/

Arianto, Adi Rio, and Gesti Anggraini. 2021. "Manunggalisme dan Disiplin Ilmu Antarbangsa (IA): Menggagas Mazhab Indonesia (MI) Melalui Tradisi Animisme, Dinamisme, dan Waliisme dan Mengarusutamakan "Gotong Royong Sebagai Sistem Dunia" Untuk Membangun Keamanan dan Tatanan Dunia Era Manunggal Abad Ke-21." *Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 2021. Journal link: http://aihii.or.id/prosiding-vennas-xii/

Arianto, Adi Rio, and Gesti Anggraini. 2023. "Manunggalism: Paradigm, Philosophy, and Theory to View the World Relations (WR) Belong to Indonesian School (Mazhab Indonesia) in Manunggalian Era 21st Century". *UGM Digital Press*, Vol. 9, No. 1, 2023. Journal link: https://digitalpress.ugm.ac.id/article/433

Arianto, Adi Rio. 2016. "Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa: Geometripolitika dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal (Era Manunggalian) Abad Ke-21." *Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia,* Vol. 7, No. 1, 2016. Journal link: https://aihii.or.id/prosiding-vennas-vii/

Arianto, Adi Rio. 2017. "Cyber Security: Geometripolitika dan Dimensi Pembangunan Keamanan Dunia Era Horizontal (Manunggal) Abad 21." *Jurnal Power in Internasional Relatios,* Vol.1, No.2. Journal Link: https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1469214&val=17736&title=Cyber%20Security%20Geometri%20Politik%20Dan%20Dimensi%20Pembangunan%20Keamanan%20Dunia%20Era%20Horizontal%20Abad%2021

Arianto, Adi Rio. 2017. "Kerjasama 'Segitiga Maritim Dunia' Indonesia-Tingkok-Rusia; Membangun Keamanan Maritim Asia Tenggara", Jurnal Power in International Relations, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017, Universitas Potensi Utama Medan.

Arif, Maskur. 2016. *Wali Sanga, Menguak Tabir Kisah Sehingga Fakta Sejarah*. Yogyakarta: Laksana.

Ashari, Khasan. 2015. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Baehr, Peter. 1998. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Beck, Adam. 2020. *Sejarah Filsafat Timur*. Yogyakarta: Indoliterasi.

Boecahari. 2018. *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti* (*Tracing Ancient Indonesian History Through Inscriptions*). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Breuning, Marijke. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.

Bryman, A. 2012. *Social Research Method 4th Edition*. New York: Oxford University Press.

Burchill, Scott. 2009. *Theories of International Relations. Basingstoke*: Palgrave Macmillan.

Carlsnaes, Walter, dkk. 2004 dan 2013. *Hanbook of International Relations*. London: Sage Publication (terjemahan bahasa Indonesia).

Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons (ed.). 2014. *Handbook Hubungan Internasional* (Terjemahan). Imam Baehaqie. Bandung: Nusamedia.

Cresswell, J. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dibb, Paul, 2001, "Indonesia: The Key to South-East Asia's Security", dalam International Affairs, 77 (4), hal. 829-842, diakses pada tanggal 10 April 2020 pukul 10.30 WIB

Djelantik, Sukawarsini. 2008. *Diplomasi antara Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Doyle, Michael W. 2012. "Liberalism and foreign policy", dalam Steve Smith, Amelia Hadfield & Tim Dunne. *Foreign Policy, Theories . Actors . Cases*. Oxford; pp. 54-77.

Flockhart, Trine. 2012. "Constructivism and foreign policy", dalam Steve Smith, Amelia Hadfield & Tim Dunne. *Foreign Policy, Theories . Actors . Cases*. Oxford; pp. 78-93.

Gardner, Paul. 1999. *Lima Puluh Tahun Hubungan Amerika Serikat-Indonesia: Bersama dalam Harapan, Sendirian dalam Kecemasan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Gearóid Ó, Tuathail, dan Simon Dalby. 1998. *Rethinking Geopolitics*, London: Routledge11 New Fetter Lane, EC4P 4EE Simultaneously published in the USA and Canada

Gitosardjono, Sukamdani S. 2006. *Dinamika Hubungan Indonesia-Tiongkok di Era Kebangkitan Asia*. Jakarta: Putra Perkasa Cahaya Bunda.

Hansen, Lene. 2012. "Discourse analysis, post-structuralism, and foreign policy", dalam Steve Smith, Amelia Hadfield & Tim Dunne, *Foreign Policy, Theories . Actors . Cases*. Oxford; pp. 94-109.

Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Hatta, Mohammad. 1988. *Mendayung di Antara Dua Karang*. Jakarta: PT Bulan Bintang.

Hayati, Sri dan Yani, Ahmad. 2007. *Geografi Politik*. Bandung: PT. Refika Aditama

Indrawan, Jerry. 2015. *Studi Strategis dan Keamanan*. Depok: Nadi Pustaka.

Juanda, Wawan. 1992, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Percetakan Binacipta

Kegley, Charles W., Jr. dan Gregory A. Raymond. 2010. *The Global Future: A Brief Introduction to World Politics. Third Edition*. Boston: Wadsworth.

Kriswanto, Agung. 2009. Pararaton: Alih Aksara dan Terjemahan. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. 2012. *Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21*. Jakarta: Pustaka Alvabet

Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*. Bandung: Penerbit Alumni.

Latif, Yudi. 2015. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.

Man, John. 2004. *Genghis Khan: legenda sang penakluk dari Mongolia*. Tangerang Selatan: Alfabet.

Martin, Griffiths dan Terry O'Callghan. 2002. *International Relations: The Key Concepts*. New York: Routledge

Mauna, Boer. 2015. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni.

Menzies, G. 2016. 1421. *Saat China Menemukan Dunia*. Tangsel: Alfabet

Nainggolan, Poltak Partogi. 2016. *Indonesia di Tengah Kebangkitan China, Jepang, dan India*. Jakarta: Balai Pustaka

Novotny, Daniel. 2010. *Torn between America and China*. Singapore: ISEAS

Nugroho, Riant. 2013. *National Security Policy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nurhayati Enung. 2018. *Gajah Mada: Sistem Politik dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Narasi.

Olthof, WL. 1941. *Babad Tanah Jawi: mulai dari Nabi Adam Sampai Tahun 1647*. Yogyakarta: Narasi.

Periangani, Ade dan Sigid Harimurti. 2004. *Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru*. Bandung: CEPLAS.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2011. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Prapanca, Mpu. 2015. Kakawin Negarakertagama. Yogyakarta: Narasi.

Prihatono, T Hari, Jessica Evangeline, Iis Gindarsah. 2007. *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*. Jakarta: Propatria Institute

Rahardjo, Soegeng. 2015. *65 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia Tiongkok: Kemitraan Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan*. Beijing: Kedutaan Besar Republik Indonesia

Riana, I Ketut. 2009. *Kakawin Desawarnana Uthawi Nagarakertagama: Masa Keemasan Majapahit*. Jakarta: Kompas.

Singer, J. David. 1961. "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", dalam *World Politics*, 14(1); pp.77-92.

Smith, Steven, Amalia Hadfield, dan Tim Dunne. 2008. *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases.* Oxford: Oxford University Press.

Soeprapto, R. 1997. *Hubungan Internasional: Sistem Interaksi dan Perilaku*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Subianto, Prabowo. 2013. *Membangun Kembali Indonesia Raya*. Jakarta: Institut Garuda Nusantara

Subianto, Prabowo. 2013. *Membangun Kembali Indonesia Raya: Strategi Besar Transformasi Bangsa*. Jakarta: Institut Garuda Nusantara.

Suropati, Untung, Ian Montratama, Yohanes Sulaiman. 2018. *Indonesia Inc: Peta Jalan Menuju Poros Maritim Dunia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Suryadinata, Leo. 1998. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES.

Swasono, Sri Edi dan Fauzie Ridjal (ed). 1992. *Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: UI Press.

Tantular, Mpu. 2009. *Kakawin Sutasoma*. Depok: Komunitas Bambu.

Tzu, Sun. 2008. *The Art of War*. Singapura: Tuttle publishing.

Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. 2013. *International Relations and World Politics. Fifth Edition*. Boston: Pearson.

Weinstein, Franklin B. 2007. *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Suharto*. Singapore: Equinox Publishing.

Wohlforth, William C. 2012. "Realism and foreign policy", dalam Steve Smith, Amelia Hadfield & Tim Dunne, *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*. Oxford.

Wuryandari, Ganewati et al. 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.